

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah :

Konflik Israel – Palestina merupakan konflik perebutan wilayah yang sudah terjadi cukup lama, hampir sekitar enam puluh tahun konflik ini berlangsung, dan tidak kunjung terselesaikan. Konflik Israel - Palestina ini bermula pada tahun 1987, saat Israel mulai menyerang Mesir, Yordania, dan Suriah, serta merebut Sinai dan Jalur Gaza (Mesir), dataran tinggi Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerusalem (Yordania).

Konflik mulai terlihat ketika Perang Dunia II terjadi. Pada tahun 1916, Inggris, Prancis, dan Rusia menandatangani perjanjian Sykes-Picot yang berisi pembagian bekas wilayah imperium Ottoman. Pada saat itu, wilayah Palestina menjadi wilayah internasional yang dikelola bersama oleh negara-negara pemenang perang. Namun kemudian, setelah dilobi kaum Zionis, Inggris menjanjikan pendirian negara Yahudi di tanah Palestina (national homeland) yang terlegitimasi dalam Deklarasi Balfour (1917). Sejak itu, Inggris membuka pintu lebar-lebar bagi imigran Yahudi yang ingin kembali ke tanah Palestina.¹

Berangkat dari semangat Deklarasi Balfour tersebut kaum Yahudi yang menyebar di seluruh dunia bertekad untuk

¹ Perang Tak Bekerjasama Palestina Israel, <http://www.google.com/url?q=https://intihidup.files.wordpress.com/2012/12/perang-tak-berkesudahan-palestina-israel.pdf>, diakses tanggal 17 Desember 2016.

mendirikan negara di tanah yang dijanjikan Tuhan mereka. Secara teologis, zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam Perjanjian lama yang dinyatakan kawasan itu sebagai ‘tanah yang dijanjikan tuhan’ (promised land) untuk bangsa Israel, sebaliknya secara historis, rakyat Palestina menyatakan kami bangsa Palestina berada di negeri ini sejak jaman Umar bin khatab.²

Pertikaian kedua belah pihak pada akhirnya sulit dihindari, sebab klaim hak atas tanah Palestina bukan sekedar menyangkut latar belakang sejarah dan wilayah politik, melainkan masalah simbol spiritualitas besar bagi kedua pihak. karena ia merupakan simbol tiga agama besar yang letaknya saling berdekatan. Di wilayah ini khususnya di wilayah Jerusalem adalah pusat Yudaisme, tempat disalibnya Yesus dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga, dan tempat yang diyakini umat Islam sebagai bagian dari perjalanan spiritualitas Muhammad ketika mengalami perjalanan malam dari Masjid al Haram ke Masjid al - Aqsha dan naik ke Sidratul Munthaha.³

Pasca pendudukan Israel atas wilayah Palestina, kehidupan rakyat palestina mengalami kecemasan dan penindasan, bahkan banyak rakyat Palestina yang harus tinggal di Camp camp pelarian seperti di Jordan, Syria, Libanon dan Mesir, karena mereka dilarang masuk ke wilayahnya. Bahkan kini Masjid al- Aqsa dan Bayt al-Maqdis masih terus dikuasai oleh Israel, rakyat Palestina dilarang mengunjungi Majid al- Aqsa tanpa ijin dari tentara Israel.

² Yunahar Ilyas, “Arab Harus Bersatu Hadapi Israel”, *Suara Merdeka*, 11 Januari 2009.

³ Trias Kuncahyono. 2008. *Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir*. Jakarta: Kompas

Upaya penguasaan wilayah Palestina oleh Israel tidak begitu saja di biarkan oleh rakyat Palestina, rakyat Palestina pun terus melakukan perlawanan dan pembelaan atas wilayahnya ini. Pada tahun 1964 dibentuklah PLO (Palestine Liberation Organization) yang merupakan sebuah organisasi politik yang di bentuk untuk tujuan mewedahi kelompok – kelompok di Palestina yang muncul akibat konflik tersebut. PLO sendiri telah dianggap sebagai sebuah representasi dari Palestina, pada pertemuan Liga Arab di Rabbat 1974 menempatkan PLO sebagai satu-satunya representasi bangsa Palestina. Mulai 1982, PLO pun telah dianggap sebagai negara ketika berhubungan dengan negara-negara Arab.

Ketika PLO mengalami kemunduran dan tidak bisa membawa aspirasi rakyat Palestina karena mengakui eksistensi negara Israel dengan jalan perundingan, muncul gerakan baru yang akan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi Israel. Hamas (Harokah al-Muqowwamah al-Islamiyyah atau Gerakan Perlawanan Islam) tahun 1987 adalah gerakan perlawanan rakyat nasional yang bergerak demi mencapai kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Hamas dan Fatah adalah fraksi besar dalam pemerintahan Palestina, keduanya memiliki platform yang berbeda, terutama jika berhubungan dengan Israel. Hamas menginginkan Palestina merdeka, dengan kata lain tidak mengakui eksistensi Israel dan tidak mau melakukan perundingan. Sedangkan Fatah menginginkan solusi berdirinya dua negara secara berdampingan dan menempuh cara perundingan damai dengan Israel.⁴ Cita – cita dan tujuan Hamas secara jelas telah tercatat dalam Piagam Hamas tahun 1988 yang tertang dalam Pasa 9 Piagam Hamas, yang memiliki tujuan umum yaitu untuk memerdekakan seluruh wilayah Palestina.

Upaya untuk menyelesaikan konflik diantara kedua Negara ini kerap kali dilakukan, salah satunya ialah melalui

⁴ *Op.cit*

jalan negosiasi yang dilakukan oleh kedua Negara ini, yang kemudian menghasilkan beberapa Perjanjian diantaranya adalah Perjanjian OSLO 1 tahun 1993 dan kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya OSLO 2 tahun 1995.

Perjanjian OSLO tahun 1993 merupakan suatu kesepakatan damai yang di tandatangi oleh Yasser Arafat (PLO) dan Yitzak Rabin di Washington DC, penanda tangan perjanjian tersebut disaksikan oleh Presiden Bill Clinton Presiden Amerika Serikat. Perjanjian OSLO 1 ini berisi pernyataan, Israel akan menyetujui pembentukan pemerintah otonom (otoritas Palestina), wilayah pemerintahan yang dibeikan hanya Gaza dan Jericho, kemudian Israel akan secara perlahan menarik pasukannya dari Tepi Barat. Sebagai gantinya Israel meminta Palestina untuk mengakui kedulatan Israel dan juga menyuarakan toleransi kepada Israel.

Perjanjian OSLO 2 ini merupakan kelanjutan dari perjanjian OSLO 1, perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 September 1995. Menurut kesepakatan ini Israel harus menyerahkan 90 persen daerah Tepi Barat yang berpenduduk sekitar satu juta orang warga Palestina, yang berarti memperluas wilayah otonom ke tujuh kota dan ratusan desa di Tepi Barat. Selain itu, perjanjian OSLO 2 juga berisi mengenai penarikan mundur Israel dari beberapa kota di Tepi Barat, yaitu Betlehem, Jenin, Nablus, Qalqilayah, Ramallah, dan Tulkarem dan 450 desa pada akhir 1995.⁵

Kesepakatan OSLO ini menimbulkan pertentangan dalam masyarakat Palestina sendiri, karena di Palestina terdapat dua fraksi yaitu Fatah dan Hamas, dimana Fatah yang lebih sekuler cenderung mendukung perjanjian OSLO tersebut. Berbeda dengan Hamas, dimana Hamas menganggap perjanjian tersebut justru secara tidak langsung berarti

⁵ Kompas, Perdamaian Tak Mudah Dicapai, 24 Oktober 1998

menyetujui pendudukan Israel ke wilayah milik Palestina, dan secara tidak sengaja mengurangi wilayah Palestina, karena Israel akan mendapatkan sebagian wilayah Palestina yang seharusnya wilayah tersebut milik Palestina. Serta Perjanjian OSLO ini cenderung bertentangan dengan cita-cita dan tujuan dari Piagam Hamas tahun 1988 Pasal 9 untuk memerdekakan seluruh wilayah Palestina.

Palestina sendiri didalam perjanjian tersebut hanya diberikan wewenang pemerintahan sementara waktu, yang berarti wewenang tersebut dapat di cabut sewaktu – waktu oleh Israel, serta wilayah Palestina yang kekuasaannya di kembalikan kembali ke Palestina hanya wilayah Gaza dan Jericho, sedangkan Jerusalem sendiri yang juga dianggap penting bagi masyarakat Palestina karena nilai spiritualnya, karena merupakan tempat dimana Nabi Muhammad ketika mengalami perjalanan malam dari Masjid al Haram ke Masjid al - Aqsha dan naik ke Sidratul Munthaha, wilayah ini tidak termasuk kedalam butir perjanjian.

Situasi tersebut menempatkan PLO dalam posisi yang dilematis, yaitu antara tunduk kepada tekanan pihak Israel dan Amerika Serikat, atau berkompromi dengan tangan tekanan dan pejuang muslim Palestina. Jika alternative pertama yang dipilih, maka bisa terjadi perang saudara antar sesama bangsa Palestina. Sebaliknya, opsi kedua hampir tidak mungkin dipilih oleh PLO mengingat selama ini mereka terbukti tidak berdaya berhadapan dengan Israel dan Amerika Serikat.⁶

⁶ Riza Sihbudi, Menyandera Timur Tengah, Jakarta:Mizan, 2007
hal.211

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka Rumusan Masalah yang coba di rumuskan oleh penulis adalah :

“Mengapa Perjanjian OSLO 1 dan 2 sebagai hasil dari negosiasi bilateral antara Israel –Palestina masih belum efektif menyelesaikan konflik diantara kedua Negara tersebut?”

C. Landasan Teori :

Konflik yang terus terjadi di antara Israel dan Palestina tersebut masih belum tampak adanya titik terang hingga saat ini, berbagai upaya pun telah dilakukan untuk meredam konflik diantara kedua Negara tersebut salah satunya ialah melalui jalan negosiasi diantara Israel dan Palestina, namun tetap tak kunjung terselesaikan.

Untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan hendaknya menggunakan pendekatan yang mampu menjelaskan permasalahan tersebut dengan benar, pendekatan tersebut dapat melalui teori. Menurut Wight teori merupakan penjelasan mengenai hukum yang mengidentifikasi hubungan yang serupa atau yang dimungkinkan terjadi. Kemudian menurut Hollis dan Smith teori berfungsi untuk mengintisarikan, menggeneralisasikan dan menghubungkan.

1. Teori Negosiasi

Teori Negosiasi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari teori Alo Liliweri tahun 2005 dalam buku yang berjudul “Prasangka & Konflik: Komunitas Lintas Budaya Masyarakat Multikultur”. Menurut Alo Liliweri negosiasi

adalah suatu proses yang melibatkan dua atau tiga pihak untuk merundingkan beberapa pilihan pendapat yang menjadi sumber konflik, guna mencapai persetujuan bersama yang saling menguntungkan dua pihak.

Negosiasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut: (a) Pembicaraan antara kedua belah pihak, (b) Proses tawar-menawar atau penyesuaian diantara kedua belah pihak; (c) Berupaya mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yaitu; (d) Tanpa prasangka; (e) Apabila berhasil, para pihak dapat menuangkan hasil kesepakatan itu dalam suatu perjanjian penyelesaian sengketa/perdamaian.

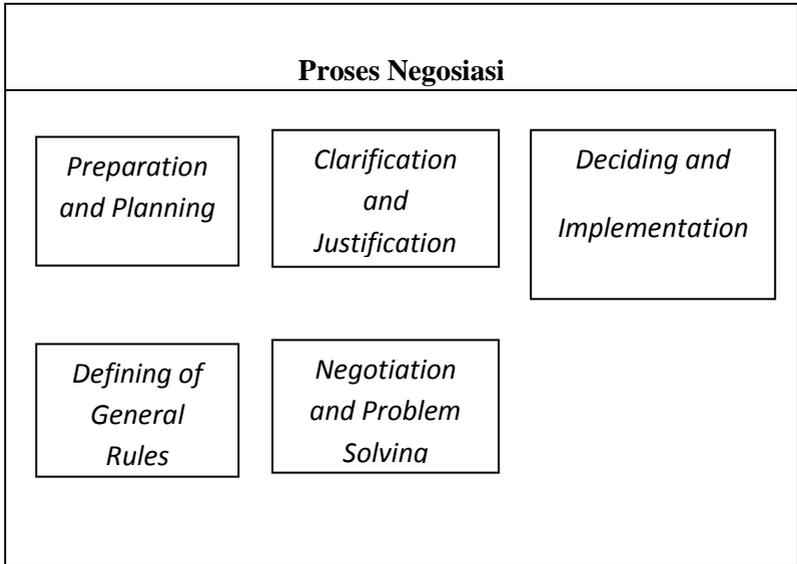
Negosiasi yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua belah pihak akan mencari solusi bagi permasalahan yang selama ini menjadi hal yang sangat substansial dan menjadi inti dari sebuah permasalahan seperti isu wilayah, pemukiman, dan tawanan.

Selain itu, penjelasan terkait proses negosiasi adalah sesuai gambar dibawah ini:

Gambar 1.1

Bagan 1

Proses Negosiasi



Sumber: Alo Liliweri. Prasangka dan Konflik. 2005.

Pada gambar diatas, digambarkan proses negosiasi. Adapun penjabarannya adalah, (a) Persiapan, dimana dua pihak (who) yaitu Israel-Palestina melakukan persiapan terkait dengan apa yang dirundingkan (which), misalnya isu apa yang akan dibicarakan. Selain itu masing-masing menjelaskan (why) mengapa isu tersebut harus dinegosiasikan, menentukan waktu (when) perundingan, tempat (where) perundingan, dan bagaimana (how) cara merundingkannya., (b) Defenisikan aturan, dua pihak yaitu Israel-Palestina memberikan defenisi terhadap berbagai aturan (rule) yang mengatur (melarang, mewajibkan, dan lain-lain) tentang isu perbedaan pendapat.,

(c) Klarifikasi, masing-masing pihak “Israel-Palestina” saling memberi kesempatan untuk memberi klarifikasi atas isu perbedaan pendapat., (d) Tawar-menawar untuk memecahkan masalah, dua pihak “Israel-Palestina” saling memberikan penawaran terhadap pilihan penyelesaian pendapat., dan (e) Akhirilah dengan implementasi, dua pihak “Israel-Palestina” mengakhiri perbedaan atau konflik dengan memberikan implementasi bersama atas apa yang telah diputuskan melalui negosiasi.⁷

2. Teori konflik

Teori Konflik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse tahun 2000 dalam buku yang berjudul “Resolusi Damai Konflik Kontemporer” terjemahan dari Tri Budhi Satrio. Miall mengklasifikasikannya menjadi dua ditinjau dari prilakunya, yaitu konflik antar negara dan konflik bukan antar negara. Konflik antar negara adalah konflik yang terjadi dan melibatkan dua negara atau lebih, sedangkan konflik bukan antar negara adalah konflik yang tidak melibatkan negara, tetapi lebih internal dan terjadi di dalam negeri, seperti konflik separatis, konflik antara masyarakat dengan pemerintah, dan lain sebagainya.⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut maka konflik Israel-Palestina adalah konflik antar negara.

Berdasarkan penjelasan kedua teori tersebut maka dapat dilihat adanya pengaruh fungsi negosiasi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Hal ini dapat dijabarkan dengan penjelasan bahwa konflik Israel-Palestina merupakan konflik antar negara yang membutuhkan penyelesaian dengan pendekatan negosiasi yang tahapan-tahapannya yaitu tahap persiapan, defenisi aturan, klarifikasi, tawar-menawar untuk

⁷ Alo Liliweri. *op cit.*

⁸ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, & Tom Woodhouse. (2000). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Terj. Tri Budhi Satrio. PT. Rja Grafindo Persada: Jakarta.

menyelesaikan masalah, dan implementasi dari kesepakatan yang telah dibuat antara Israel-Palestina untuk perdamaian

D. Hipotesis :

Melalui permasalahan yang di lihat menggunakan teori negosiasi dan teori konflik diatas, maka dapat di tarik jawaban sementara dari penyebab ketidak efektifan negosiasi bilateral antara Israel dan Plestina tahun 1993 dan 1995 dalam menyelesaikan gejolak diantara Israel dan Palestina adalah sebagai berikut :

- 1). Masih terdapat konflik dalam negeri di Plestina antara kubu Hamas dan Fatah, yang belum mencapai suatu kesepakatan, dimana hamas merupakan pergerakan masyarakat yang cenderung keras, sementara Fatah relatif moderat.
- 2). kurangnya preparation, planning, deciding, dan implementation dari fungsi negosiasi yang mengakibatkan kegagalan dari negosiasi tersebut, sehingga konflik masih berkelanjutan hingga saat ini.

E. Tujuan penelitian :

- 1) Menjelaskan kronologis dari konflik Israel-Palestina pada tahun 1993-1995 dan proses dari fungsi negosiasi dalam penyelesaian konflik tersebut.
- 2) Mengetahui ketidakefektifan negosiasi bilateral dalam konflik Israel-Palestina pada tahun 1993-1995.

- 3) Mengetahui bagaimana menggunakan perspektif dan teori-teori dalam suatu penelitian yang melibatkan operasionalisasi teori.

F. Batasan penelitian :

Untuk memudahkan penelitian, penulis akan membatasi jangka waktu antara tahun 1993 yaitu proses negosiasi lewat perjanjian OSLO yang telah disepakati. Namun perjanjian dari negosiasi yang dilakukan mengalami kegagalan yang berujung pada puncak dari penyerangan Israel terhadap Palestina hingga 1995.

G. Metode penelitian

- 1) Tipe penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang menggambarkan signifikansi negosiasi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dimulai dari penggambaran konflik Israel-Palestina, kemudian menggambarkan proses negosiasi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

- 2) Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data teoritis yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan ini bersifat kualitatif, yang selanjutnya akan dianalisis, dimana penulis akan menjawab permasalahan berdasarkan fakta-fakta dan data yang penulis peroleh.

- 3) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (library research) yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, artikel-artikel dalam majalah maupun surat kabar, maupun data dari situs-situs internet. Bahan-bahan tersebut sebagian besar diperoleh dari beberapa buku yang tersedia di perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, toko-toko buku, perpustakaan pusat dan fakultas di UMY, serta ditambah dengan buku-buku koleksi pribadi.

4) Teknik analisis data

Teknik analisis data penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis ini ditekankan pada data kualitatif yang analisisnya akan diarahkan pada data non-matematis. Dukungan data-data kuantitatif yang berkaitan dengan obyek penelitian, juga disertakan untuk memperkuatnya.

H. Sistematika penulisan :

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Penulis menjelaskan proses terjadinya konflik Israel-Palestina pada tahun 1993–1995. Dimana, penjelasannya yaitu mengenai permasalahan konflik yang berkepanjangan.

BAB III Penulis menjelaskan tentang adanya konsep negosiasi Israel-Palestina pada tahun 1993-1995. Dimana penjelasannya

yaitu penyebab dari signifikansi negosiasi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina yang mengalami kegagalan.

BAB IV Penulis menjelaskan sebab-sebab ketidakefektifan fungsi negosiasi dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina pada tahun 1993 – 1995 yang tidak kunjung selesai permasalahan konflik tersebut, sehingga diperlukan adanya negosiasi yang mengikat kepentingan kedua negara.

BAB V Penulis mengungkapkan kesimpulan dan saran secara keseluruhan dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV.